

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPU Kota Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuratibel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kota Pontianak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Pontianak, Juli 2022
Sekretaris,

[Signature]
Suardiana,SH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	41
VI. Lampiran dan Daftar	46



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Alamat Jalan Johar No.1A - Pontianak 78111

Tlp. (0561) 740021

Fax. (0561) 740021

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, Juli 2022

Secretaris,

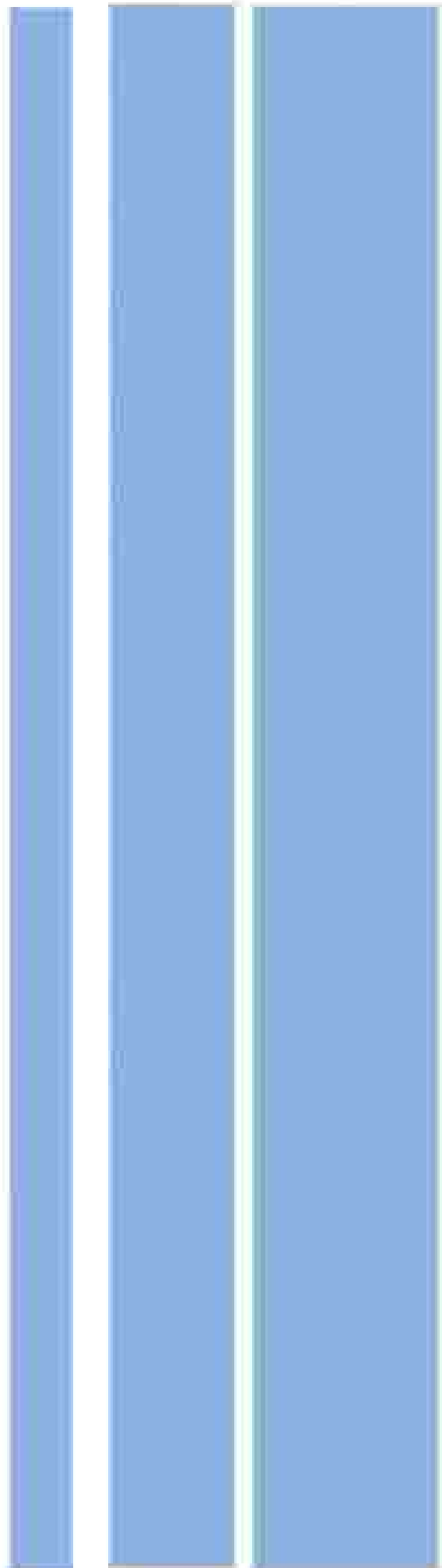


Suardiana, SH

NIP. 19650623 199203 2 005

**Komisariat Pemilihan Umum
Kota Pontianak**
Untuk Periode yang Berakhir
30 Juni 2022

Jl. Johar No. 1A
Pontianak, Pontianak 78111



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
30 Juni 2022

Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak Semester I Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0. Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp.1.440.937.341 atau mencapai 42 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.401.769.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2022. Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 431.744.161 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 24.000.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0 (Nihil); Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 348.006.765; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0 (nihil).

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 294.935.552 dan Rp.77.071.213.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0 (Nihil), sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 1.821.610.289 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (1.821.610.289). Surplus Kegiatan Non Operasional, Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Defisit Pos-

pos Luar Riata masing-masing sebesar Rp. 0, sebesar Rp.0 dan sebesar Rp.(1.821.610.289) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(1.821.610.289).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp.457.744.161,- dikurangi Defisit-LO sebesar (1.821.610.289), ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 1.440.937.341,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp. 77.071.213,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPU KOTA PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% (thd Anggaran)	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	8.1	-	-	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,00	-
BELANJA	8.2				
Belanja Pegawai	8.3	2.940.041.000	1.179.888.435	40,13	1.179.888.360
Belanja Barang	8.4	382.700.000	381.175.698	99,71	222.081.104
Belanja Modal	8.5	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		3.322.741.000	1.561.064.133	46,38	1.401.969.464

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**KPU KOTA PONTIANAK
NERACA
PER 30 Juni 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	KATEGORI	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	01.01	34.000.000	
Kas di Bendahara Penghasilan	01.02		
Kas Lainnya dan Setara Kas	01.03		
Piutang Bukan Pajak	01.04		
Sisaan Lancar TV/TGB	01.05		
Sisaan Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	01.06		
Perhitungan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	01.07		
Sedana Dikawatirkan Moka	01.08		
Pendapatan yang Masih harus Ditagih	01.09		
Persediaan	01.10		
Jumlah Aset Lancar		34.000.000	
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TPH	02.01		
Tagihan Penjualan Angsuran	02.02		
Perhitungan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	02.03		
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
ASET TETAP			
Tanah	03.01		
Peralatan dan Mesin	03.02	0.947.288.158	0.947.288.158
Gedung dan Bangunan	03.03		
Jalan, Jembatan dan Jembatan	03.04		
Aset Tetap Lainnya	03.05		
Worthless dalam perseorangan	03.06		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	03.07	0.199.954.999	0.088.944.999
Jumlah Aset Tetap		847.333.158	858.343.158
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	04.01		
Aset Lain-lain	04.02	925.000	925.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya	04.03	(925.000)	(925.000)
Jumlah Aset Lainnya			
Jumlah Aset		931.333.158	916.686.316
KEWajiban			
KEWajiban Jangka Pendek			
Kredit yang Belum Diantar	05.01		
Utang Rikada dan RPPH	05.02	34.000.000	
Utang kepada Pihak Ketiga	05.03	253.021.004	
Utang yang belum dipayahi	05.04	15.854.538	
Pendapatan Dittahabi Moka	05.05		
Sedana yang Masih harus Dibayar	05.06		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		292.875.532	
Jumlah Kewajiban		292.875.532	
EKUITAS			
Ekuitas	06.01	77.871.212	857.749.384
Jumlah Ekuitas		77.871.212	857.749.384

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KPU KOTA PONTIANAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2022 DAN 2021

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	0.2	1.534.758.448	1.075.131.260
Beban Pembebasan	0.3	-	11.472.100
Beban Barang dan Jasa	0.4	136.441.366	284.235.992
Beban Pemeliharaan	0.5	28.462.078	28.139.112
Beban Perjalanan Dinas	0.6	1.350.000	3.130.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	0.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.9	104.777.356	145.780.268
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1.821.810.288	1.548.962.727
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.821.810.288)	(1.548.962.727)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.821.810.288)	(1.548.962.727)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBP	0.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Pembebasan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.821.810.288)	(1.548.962.727)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPU KOTA PONTIANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E1	457.744.355	398.174.910
SURPLUS/DEFISIT	E2	(1.331.830.288)	(1.548.962.777)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENURUNKAN EKUITAS:	E3		10.867.797
DAMPAK QUALITY PERCEKAMAN			
KEBUNYAKAN/KEBALAKAWAN MENYASER	E3.1	-	-
PENYELUSUNAN NILAI ASET	E3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E3.3	-	-
KOREKSI ATAS REVALUASI	E3.4	-	(14.170.200)
SELISIR REVALUASI ASET TETAP	E3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NOV REVALUASI	E3.6	-	15.000.000
KOREKSI LAIN-LAIN	E3.7	-	-
Jumlah		-	10.867.797
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E4	1.448.012.541	1.467.115.484
EKUITAS AKHIR	E5	773.926.613	817.302.444

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPU Kota Pontianak
Pontianak****Dasar****Hukum****Entitas dan****Rencana****Strategis**

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di Jalan Johar No. 1A Pontianak, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawahan Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap

- daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. membantuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilu secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. melaksanakan putusan DKPP, dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

Visi

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas di Kota Pontianak."

MISI

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melakukan langkah langkah strategis sebagai berikut :

- Membangun KPU Kota Pontianak dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas.
- Meningkatkan kualitas pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- Memberikan pelayanan dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara.
- Menegakan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kota Pontianak untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Kota Pontianak yang demokrasi.

**Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan**

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Kota Pontianak Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruel (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

KPU Kota Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPU Kota Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis:

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Kota Pontianak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi.

yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa
- o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkanya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valute asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BIU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Pertendahaaran/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuah pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

e. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai

berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Putang
Jangka
Panjang*

d. Putang Jangka Panjang

- Putang Jangka Panjang adalah putang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan putang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 520/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rebasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol I	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang
 - **Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Penerimaan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, KPU Kota Pontianak telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi pada saat pelaksanaan, dimana pada saat periode berjalan terjadi pergeseran anggaran dana DIPA Tahun 2022 oleh KPU RI, dalam rangka pemenuhan belanja Prioritas Nasional (PN) dalam rangka pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Indonesia sesuai peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun

2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan belanja barang kegiatan PN, pagu DIPA bertambah sebesar Rp. 178.442.000. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.540.041.000	2.540.041.000
Belanja Barang	659.305	837.747.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	3.200.346.000	3.407.788.000

Realisasi
Pendapatan
Rp.0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0 (Nihil). Pendapatan KPU Kota Pontianak pada periode ini, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Pendapatan TA 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan KPU Kota Pontianak bukan satker PNEP. Pendapatan Lain-lain KPU Kota Pontianak mengalami tidak perubahan yaitu sebesar 0% yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan pendapatan dari pemindahtanganan EMN Lainnya yaitu berupa hasil lelang bulik suara berbahan aluminium eks Pemilu 2004 dan eks Pemilu 2009 yang berasal dari tahun anggaran berjalan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA. 2021	REALISASI TA. 2022	NAKUTURUN (%)
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

Rp. 1.440.937.341

Realisasi Belanja instansi pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 1.440.937.341 atau 42,35% dari anggaran belanja sebesar Rp 3.401.769.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anng
Belanja Pegawai	1.340.147.000	1.177.865.415	87,89
Belanja Barang	161.722.000	161.171.930	10,01
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	3.401.769.000	1.440.937.341	42,35
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	3.401.769.000	1.440.937.341	42,35

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar (3,76%) dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Penurunan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal terjadi karena adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi, kondisi pada saat pelaksanaan untuk mendukung rencana strategis pada TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. KPU Kota Pontianak melaksanakan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan operasional perkantoran dan anggaran pencegahan COVID-19.
2. Di awal bulan Januari Tahun 2022, di Indonesia masih ditetapkan sebagai Negara mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat pandemi covid-19 yang masih menulari beberapa wilayah Provinsi, dan Kabupaten/Kota namun kasus penularannya sudah jauh menurun. Dengan demikian Kementerian Keuangan RI mengambil kebijakan agar realisasi

belanja barang penanganan pandemi covid19 untuk dipercepat sehingga tujuan Pemerintah dalam rangka pencegahan penularan Covid19 dapat terlaksana dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

3. Adanya penambahan anggaran belanja barang kegiatan PN ke dalam DIPA Tahun 2022 untuk pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024 bahwa Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 baru di mulai tanggal 14 Juni 2022.
4. Terlambatnya Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024, sehingga anggaran belanja barang PN belum dapat digunakan.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.279.665.415	1.275.131.260	0,36
Belanja Barang	101.271.928	222.051.204	(27,37)
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	1.440.937.341	1.497.182.464	(0,76)

Belanja

Pegawai

Rp. 1.279.665.415

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.279.665.415 dan Rp. 1.275.131.260. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,36% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya anggaran Tunjangan Kinerja Hari Raya (Tunkin THR) PNS yang telah dianggarkan dalam DIPA TA 2022.
2. Adanya anggaran Tunjangan Kinerja PNS ke-14 dan Tunjangan Kinerja PNS ke-13 yang telah dianggarkan dalam DIPA TA 2022.
3. Adanya anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Ketua dan Anggota KPU (Non PNS) sesuai alokasi dana THR dalam DIPA Tahun 2022.
4. Adanya anggaran Uang Kehormatan bagi Ketua dan Anggota KPU (Non PNS) bulan Ketigabelas sesuai alokasi dana dalam DIPA Tahun 2022.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	878.300.188	888.270.288	4,78
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	401.588.250	416.236.000	3,57
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	20.553.000	-
Belanja Vaksin	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.279.888.438	1.325.131.288	0,38
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	1.279.888.438	1.325.131.288	0,38

Belanja

Barang

Rp.161.271.926

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 161.271.926 dan Rp.222.051.204. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar (27,37)% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini antara lain disebabkan oleh pagu anggaran DIPA Tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 belum dapat direalisasikan secara optimal mengingat tahapan dan jadwal Pemilu 2024 baru dimulai tanggal 14 Juni 2023, sehingga anggaran belanja barangnya belum dapat digunakan sama sekali, sesuai edaran atau arahan KPU RI, sedangkan di TA 2021 pagu

DIPA KPU untuk membiayai belanja barang operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sepanjang Tahun 2021.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	104.281.678	53.201.400	21,35
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-
Belanja Jasa	13.581.000	32.200.000	5,30
Belanja Pemeliharaan	1.038.800	23.120.112	22,77
Belanja Perjalanan Dalam negeri	150.000	3.150.000	94,24
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	141.271.926	222.041.284	27,37
Penghasilan Searif	-	-	-
Jumlah Belanja	141.271.926	222.041.284	27,37

Belanja Modal

Rp. 0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 (Nihil) dan Rp. Rp. 0 (Nihil). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tidak ada Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 sehingga mengalami kenaikan/penurunan sebesar (0%) dibandingkan TA 2021 disebabkan tidak ada pagu anggaran belanja modal dalam DIPA TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Penghasilan	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp. 0, mengalami kenaikan/pemurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal ini

disebabkan tidak ada pegu anggaran belanja modal dalam DIPA TA 2022.

Perbandingan Realsasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	PAH (TURUN)
Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	0,00
Alat Kantor	-	-	0,00
Alat Rumah Tangga	-	-	0,00
Alat Studio	-	-	0,00
Alat Telekomin	-	-	0,00
Unit Alat Laboratorium	-	-	0,00
Komputer Unit	-	-	0,00
Peralatan Komputer	-	-	0,00
Alat Kerja Pemeliharaan	-	-	0,00
Jumlah Belanja Motor	-	-	0,00
Pengangkutan	-	-	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 24.000.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.000.000 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dimana sisa UP/TUP sudah dipertanggungjawabkan.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan 2021

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang Tunai	13.383.173	-
Di Realisasikan	13.382.894	-
Bank MANDIRI (No. acc 5100128585321000)	258.133	-
Jumlah	24.000.000	

Belanja
Dibayar di
Muka Rp.0

C.2 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa, telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Pembayaran rekening PDAM	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Logistik	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp.0

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan Per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bahwa nilai persediaan per 30 Juni 2022 dari saldo persediaan tahun lalu berupa bilik suara berbahan aluminium eks Pemilu Tahun 2004 dan Pemilu Tahun 2009 dalam kondisi baik sudah dilakukan lelang secara online melalui KPKNL Pontianak pada TA 2021.

Bahwa pengajuan penghapusan kotak suara tahun 2004 dan kotak suara tahun 2009 berbahan aluminium dalam kondisi baik telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Barang Eselon I KPU RI, maka KPU Kota Pontianak telah melakukan lelang di KPKNL Pontianak secara online. KPU Kota Pontianak telah mengajukan SK penghapusan persediaan tersebut ke KPU RI namun belum terbit SK. Berdasarkan hasil pendampingan penyusunan Laporan Keuangan KL dari KPU RI bahwa penghapusan di aplikasi persediaan dapat dilakukan berdasarkan BAST yang ditandatangani oleh Pemenang Lelang, sehingga di aplikasi persediaan sudah mengalami penghapusan nilai aset persediannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

**Peralatan dan
Mesin**
Rp 2.547.259.158

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp. 2.547.259.158 dan Rp.2.547.259.158. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2022	2.547.259.158
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Hilang Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tamban	
Mutasi kurang	0
Pengurangan dan penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2022	2.547.259.158
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	2.199.252.393
Nilai Buku per 30 Juni 2022	348.006.765

Tidak ada Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin periode 30 Juni 2022.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
(2.199.252.393)**

C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp.(2.199.252.393) dan Rp.(2.089.514.997). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selama untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2022 dan 2021**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.547.259.155	1.199.282.093	1.347.977.062
2	Bangunan dan Bangunan	0	0	0
3	Kendaraan, Angkut dan Jalan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	2.547.259.155	1.199.282.093	1.347.977.062

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lain-Lain

Rp 925.000

C.5 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain Per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp.925.000 dan Rp 925.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Berdasarkan surat persetujuan dari Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 1116/RT.01.3-SD/04/SJ/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 hal tentang persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPU Kota Pontianak, telah dilakukan pelelangan atas BMN dalam kondisi rusak berat. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2022	925.000
Mutasi tambah:	
- realokasi dari aset tetap	0
Mutasi kurang:	
- pengembalian kembali BMN yang diwartakan	0
- penghapusan BMN	0
Saldo per 30 Juni 2022	925.000
Akumulasi Penyusutan	(925.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp. 925.000

C.7 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp.925.000 dan Rp.925.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perkiraan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Jumlah			0
Aset Lainnya	925.000	(925.000)	0
Jumlah	925.000	(925.000)	0

Amortisasi ATE dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATE dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp. 255.051.034

C.8 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.255.051.034 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021
Biaya langganan Air PDAM bulan Desember	0	0
Baktihs Pegawai bulan Juli 2021	255.031.034	0
Jumlah	255.031.034	0

*Uang Muka dari KPPN
Rp. 24.000.000*

C.9 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 24.000.000 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp. 77.071.213*

C.10 Ekuitas

Ekuitas Per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 77.071.213 dan Rp.457.744.161. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan FNEP
Rp. 0*

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIB (TUPUKM) TA
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Pendapatan Lain-Lain KPU Kota Pontianak adalah sebesar Rp. 0.

Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp. 1.534.716.449 Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.534.716.449 dan Rp.1.275.131.260. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	MAK (TURUN) %
Beban Gaji	425.416.725	507.403.472	14,10
Beban Tunjangan	388.101.720	758.344.351	52,53
Beban Hibah dan Valsel	-	-	-
Beban Lain-lain	-	219.383.437	-100,00
Jumlah	1.534.716.449	1.275.131.260	-98,99

Beban

Persediaan

Rp. 0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 11.472.100. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	MAK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	11.472.100	-100,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Barang-barang/Beban Suku	0	0	0,00
Beban Persediaan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	11.472.100	-100,00

Beban Barang dan Jasa
Rp. 156.441.366

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 156.441.366 dan Rp.164.235.992. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena pagu anggaran DIPA Tahun 2022 hanya membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang sifatnya rutin/terus-menerus setiap tahun. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	VAR. (Persen)
Beban Barang Operasional	30.902.478	14.180.880	(54,31)
Beban Langganan Jasa dan Jasa	31.617.112	16.400.004	(48,55)
Beban Jasa Perawatan	13.200	335.800	(97,54)
Beban Jasa Konsultan	-	-	0,00
Beban Jasa Pemas	-	-	0,00
Beban Jasa Lainnya	12.788.965	20.028.719	(36,33)
Beban Aset Ekstrakurikuler Perawatan dan Uraian	-	-	0,00
Beban Aset Ekstrakurikuler Gedung dan Bergambar	-	-	0,00
Beban Aset Ekstrakurikuler Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00
Jumlah	156.441.366	164.235.992	(4,79)

Beban Pemeliharaan
Rp. 18.465.078

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.465.078 dan Rp.23.193.112. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	Var (Miliar %)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Meubel	18.465.078	23.152.112	(20,39)
Beban Pemeliharaan Asumptif	-	-	-
Jumlah	18.465.078	23.152.112	(20,39)

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp.2.250.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.250.000 dan Rp.3.150.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh adanya rapat koordinasi secara daring tanpa tetap muka dalam rangka pencegahan Covid19. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	Var (Miliar %)
Beban Perjalanan Dasar	95.000	1.200.000	(92,19)
Beban Perjalanan Dasar Luar Kota	2.100.000	1.900.000	14,47
Beban Perjalanan Dinas Panel Meeting Dasar Kota	-	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas Panel Meeting Luar Kota	-	-	0,00
Jumlah	2.250.000	3.100.000	(28,37)

Beban Barang
untuk

Diserahkan
kepada

Masyarakat

Rp.0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 (nihil) dan Rp.0 (nihil). Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, KPU Kota Pontianak untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada Tahun 2021. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan 2021

URAIAN JENJUR BEBAN	TH 2022	TH 2021	SIK (TURUN) %
Beban Pekerjaan dan Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemas	5	2	60
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemas	0	1	0
Jumlah	5	3	60

Beban

Penyusutan

dan Amortisasi:

Rp. 109.737.396

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.109.737.396 dan Rp. 149.780.263. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2022	TH 2021	SIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Perakutan dan Mesin	109.737.396	149.780.263	(26,72)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	109.737.396	149.780.263	(26,72)
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lainnya	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	109.737.396	149.780.263	(26,72)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp. 457.744.161

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 457.744.161 dan Rp.976.174.910.

Defisit LO

Rp. (1.821.610.289)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. (1.821.610.289) dan Rp.(1.646.962.727). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 (Nihil) dan Rp.0 (Nihil). Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 (nihil) dan Rp0 (nihil). Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Batang Konsumsi	-
Bahan Cadang	-
Jumlah	-

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp. 0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. (14.192.203). Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 (nihil) dan Rp0 (nihil).

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp. 0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 25.000.000. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 (nihil) dan Rp.0 (nihil). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi

Antar Entitas

Rp. 1.440.937.341

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.440.937.341 dan Rp. 1.497.182.464. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.440.937.341
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Penggeseran Hibah Langsung	-
Penggeseran Pengempasan Hibah Langsung	-
Jumlah	1.440.937.341

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2022, DDEL sebesar Rp.0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 1.440.937.341.

Ekuitas Akhir

Rp. 77.071.213

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 77.071.213 dan Rp. 837.202.444.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Setelah tanggal 30 Juni 2022, bahwa KPU Kota Pontianak telah melakukan revisi halaman III DIPA dan Revisi POK (revisi ke-6) Tahun 2022, dengan Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 22 Juli 2022, Digital Stamp: 0112-6308-0259-0993, merupakan kewenangan KPA yang dilakukan melalui Kanwil DJPB Kalimantan Barat, revisi ini dilakukan dalam rangka untuk pemenuhan anggaran belanja barang berupa perjalanan dinas meeting luar kota kegiatan Bimbingan Teknis SIFOL yang dilaksanakan oleh KPU RI di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024.

Bahwa KPU Kota Pontianak terdapat pengembalian belanja pegawai karena tertanjar bayar di bulan April 2022, karena ada 1 pegawai meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2022. Belum dilakukan pemulihan pagu DIPA KPU Kota Pontianak TA 2022, namun telah disetor ke kas Negara dengan bukti setor sebagai berikut:

- a) NTPN: 5499B0JSQI3TSUUC, NTB: 000000717445
kode akun 511111 sebesar Rp. 3.272.200;
- b) NTPN: 6633C6QR9C4KOVKR, NTB: 000000633972
kode akun 511119 sebesar Rp.72;
- c) NTPN: 75C035UDPHI7KGKC, NTB: 000000657626
kode akun 511126 sebesar Rp. 72.420;
- d) NTPN: 6D466DJSQI3TSRLO, NTB: 000000587660
kode akun 511151 sebesar Rp.185.000.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/2022 tanggal 3 Januari 2022, perihal Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

2. Menindaklanjuti dasar tersebut Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 1/KU.05/6171/2022 Tanggal 04 Januari 2022, Nomor 2/KU.05/6171/2022 Tanggal 04 Januari 2022, dan Nomor 3/KU.05/6171/2022 Tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak adalah :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ana Suardiana
Pejabat Pembuat Komitmen	: Syarifah Alifiah
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Uray Yumnasi
Bendahara	: Agus Prihartono

3. Bahwa Satker KPU Kota Pontianak telah melakukan Revisi Anggaran DIPA sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Revisi ke-01 dilakukan oleh Eselon I dalam rangka pemenuhan anggaran belanja barang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024, dengan Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 31 Januari 2022, Digital Stamp: 0742-7149-7050-4030, merubah Pagu DIPA semula Rp. 3.223.327.000 menjadi Rp. 3.401.769.000;
- 2) Revisi ke-02 dilakukan oleh dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi administrasi pada Halaman III DIPA Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 12 Mei 2022, Digital Stamp: 0742-7149-7050-4030, tidak nerubah pagu DIPA;

- 3) Revisi ke-03 dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi administrasi pada Halaman III DIPA Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 13 Juni 2022, Digital Stamp: 0742-7149-7050-4030, tidak merubah pagu DIPA;
 - 4) Revisi ke-04 dilakukan oleh Eselon I melalui Kantor DJA Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 20 Juni 2022, Digital Stamp: 0112-6308-0259-0993, tidak merubah Pagu DIPA namun ada pergeseran anggaran;
 - 5) Revisi ke-05 dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi administrasi pada Halaman III DIPA Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 06 Juli 2022, Digital Stamp: 0112-6308-0259-0993, tidak merubah Pagu DIPA;
 - 6) Revisi ke-06 oleh dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi administrasi dan revisi FOK dalam rangka pergeseran anggaran belanja barang Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 22 Juli 2022, Digital Stamp: 0112-6308-0259-0993, tidak merubah Pagu DIPA;
4. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDIT) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam LHP Nomor: 37/LHP/XIX/PNK/12/2014 tanggal 01 Desember 2014, KPU Kota Pontianak telah melaksanakan tindak lanjut atas LHP TA. 2013-2014 dan LHP Pemilu TA 2009 tersebut sebagaimana terlampir dalam laporan keuangan ini.
 5. Bahwa KPU Kota Pontianak telah melakukan pengusulan penghapusan persediaan dalam kondisi baik di Aplikasi Persediaan dan masih menunggu SK Penghapusan dari Pusat, sesuai surat usulan penghapusan Sekretaris KPU Kota Pontianak Nomor: 105/RT.01.3/6171/2021 tanggal 18 November 2021.

6. Bahwa KPU Kota Pontianak telah melakukan pengusulan penghapusan BMN sudah rusak berat dan aset tetap yang tidak digunakan di Aplikasi SIMAK BMN dan masih menunggu SK Penghapusan dari Pusat
7. Bahwa terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp.1.521.610.289);
8. Bahwa terdapat Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar (Rp.1.521.610.289);
9. Bahwa terdapat Surplus/Defisit LO sebesar (Rp.1.521.610.289);
10. Bahwa terdapat Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.1.440.937.341;
11. Bahwa terdapat Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar (Rp. 380.672.948)
12. Bahwa terdapat Ekuitas Akhir sebesar Rp.77.071.213;
13. Bahwa KPU Kota Pontianak tidak ada belanja barang yang dibayar di muka (*Prepaid*) di periode akhir laporan tanggal 30 Juni 2022;

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRAS
 Tanggal : 28-07-2022
 Halaman : 2
 Prog id : 10000

KEBANTERAN / LEMBAGA
 ESelon 1
 WILAYAH PROVINSI
 SATUAN KERJA
 JENIS KENDARAAN

076 KANTOR PEMILIHAN UMUM
 01 KANTOR PEMILIHAN UMUM
 1300 KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 000003 KPU Kota Pontianak
 00 Kantor Daerah

No	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS/DI BAWAH	% REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS/DI BAWAH	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B12	Beban Pajak	0	0	0	-	0	0	0	-
B124	Pembayaran Pajak Uang	0	0	0	-	0	0	0	-
B1241	Sewa	0	0	0	-	0	0	0	-
B1242	Haji	0	0	0	-	0	0	0	-
B1243	Beban Pajak	0	0	0	-	0	0	0	-
B1244	Sewa Lain-Lain	0	0	0	-	0	0	0	-
	Jumlah Belanja Negara	3,491,755,000	1,470,357,341	(1,999,857,659)	42,36	2,501,282,000	0	(2,491,282,000)	-
C	PEMBAYARAN								
C1	PEMBAYARAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	-	0	0	0	-
C11	Pembelian Dalam Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
C13	Neto Pembelian Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	-	0	0	0	-
C2	PEMBAYARAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	-	0	0	0	-
C21	Pembelian Pembayaran Luar Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
C22	Pembayaran ODA/Pembelian Uang Luar Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
	Jumlah Pembayaran	0	0	0	-	0	0	0	-



Surabaya, 30 Juni 2022

SEKRETARIS

M. SUARDIANA

(021) 52002000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022

Kode Lap : LRASS
 Tanggal : 23-07-2022
 Halaman : 1
 Prog ID : k_gash

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN / LEMBAGA
 (SEBELUM)
 WILAYAH PROVINSI
 SATUAN KERJA
 JENIS KEWENANGAN

076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 1200 KPU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 652630 KPU, KOTA PONTIANAK
 XD Kantor Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS DI BAWAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
A.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	0	0	0	-
A.1.1	Penerimaan Pajak Negeri	0	0	0	-
A.1.1.a	Penerimaan Pajak	0	0	0	-
A.1.1.b	Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	-
A.1.2	Hibah	0	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	-
B.	BELANJA NEGARA				
B.1	BELANJA TRANSAKSI	3.401.700.000	1.440.827.341	(1.960.872.659)	42,36
B.1.1	Rendah Memu	3.401.700.000	1.440.827.341	(1.960.872.659)	42,36
B.1.1.a	Belanja Pegawai	2.540.041.000	1.279.065.415	(1.260.975.585)	50,36
B.1.1.b	Belanja Barang	801.720.000	(61.271.326)	(700.458.074)	(14,71)
B.1.1.c	Belanja Modal	0	0	0	-
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	-
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	-
B.1.1.g	Kerugian Sosial	0	0	0	-
B.1.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
B.1.2	Program dan Hibah	0	0	0	-
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	-
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	-
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	-
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	-
B.1.2.g	Kerugian Sosial	0	0	0	-
B.1.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-
	JUMLAH BELANJA NEGARA	3.401.700.000	1.440.827.341	(1.960.872.659)	42,36
C.	PEMBIAYAAN				
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.1.1	Penerimaan Dalam Negeri	0	0	0	-
C.1.2	Non-Penerimaan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	-
C.2	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	-
C.2.1	Penerimaan Penerimaan Luar Negeri	0	0	0	-
C.2.2	Pembayaran Gajian Pihak Luar Negeri	0	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	-



Surabaya, 20 Juni 2022

SEKRETARIS


NIA ELJANDIANA

08563140152001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : NSADIT
 Tanggal : 23-07-2022
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESEKON : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KPU - PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : 000002 KPU - KOTA PONTIANAK
 JENIS KEWENANGAN : 02 Kantor Daerah

NAMA PERORANG	JUMLAH
1.	2.
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajakon Barang Mewah	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
Pendapatan Cukai	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0
Pendapatan Sisa Masa	0
Pendapatan Sisa Kiklas	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Air	0
Pendapatan Bagian Pemernlah atas Laba	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0
PENDAPATAN Hibah	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	1.234.710.449
Beban Periodisat	0
Beban Barang dan Jasa	150.441.200
Beban Pemeliharaan	18.405.076
Beban Perjalanan Dinas	2.200.000
Beban Barang Utuh dan/atau Repara Masayarak	0
Beban Bunga	0
Beban Subsidi	0
Beban Hibah	0
Beban Bantuan Sosial	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	114.727.200
Beban Penjualan Pabang Tak Integrit	0
Beban Transfer	0
Beban Lain-lain	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	1.527.610.299
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (S. A-B)	(1.527.610.299)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)

Kode Lajur : NSAK011
 Tanggal : 23-07-2022
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 075 KEMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : 61 KEMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : 508352 KPU KOTA PONTIANAK
 JENIS KEWENANGAN : RD Kantor Daerah

NAMA PERUBAHAN	JUMLAH
1	2
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pendapatan Penyelidikan Kewajiban Jangka Panjang	0
Beban Penyelidikan Kewajiban Jangka Panjang	0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelidikan Kewajiban Jangka Panjang	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)	0
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E=C+D)	(1.801.810.200)
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	0
Beban Luar Biasa	0
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	0
SURPLUS/ DEFISIT, LO (E+F)	(1.801.810.200)

Pontianak, 30 Juni 2022


 SEKRETARIS
 ELGARDIANA
 (2306210000000)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

Kode Lm : TINGKAT SATKER

Tanggal : 23-07-2022

Halaman : 1

KEWENTERAN / LEMBAGA
ESKELON 1
WILAYAH PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS KEWENANGAN

075 KOMISI PEMILIHAN UMUM
01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
1300 KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
656332 KPU KOTA PONTIANAK
KD Kantor Daerah

No	Uraian	JUMLAH		PERUBAHAN (PENURUNAN)	
		30 JUNI 2022	30 JUNI 2021	JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	EKUITAS AWAL	457,744,181	0	457,744,181	-
2	GUNPLUS / DEFISIT - LO	(1,821,810,289)	0	(1,821,810,289)	-
3	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENURUNKAN EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN	0	0	0	-
3.a	Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
3.b	Korupsi Nilai Persediaan	0	0	0	-
3.c	Korupsi Nilai Peralengkapan	0	0	0	-
3.d	Gatalnya Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
3.e	Korupsi Nilai Real Time Temp. dan Revenue	0	0	0	-
3.f	Korupsi Lain-lain	0	0	0	-
4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,440,837,341	0	1,440,837,341	-
5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(380,072,948)	0	(380,072,948)	-
6	EKUITAS AKHIR	77,071,213	0	77,071,213	-

Pontianak, 30 Juni 2022
SEKRETARIS

MHA GUARDIANA
1969062119920020005



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : 13AAB
 Tanggal : 29-07-2022
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA LINGKARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESEKON 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI 1300 KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA 000002 KPU KOTA PONTIANAK
 JENIS KEWENANGAN 02 Kantor Daerah

NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH
1.	2.
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bank/Bunga Penghasilan	24.000,000
Jumlah ASET LANCAR	24.000,000
ASET TETAP	
Peralatan dan Meubel	1.047.209,150
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Meubel	(2.100.000,000)
Peralatan dan Meubel (Netto)	346.006,765
Jumlah ASET TETAP	346.006,765
ASET LAINNYA	
Aset Lancar	(925,000)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(925,000)
Jumlah ASET LAINNYA	0
Jumlah ASET	372.006,765
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga	253.001,004
Utang Yang Belum Ditagih	11.864,515
Utang Muka dari KPPN	24.000,000
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	288.865,519
Jumlah KEWAJIBAN	288.865,519
EKUITAS	
EKUITAS	
Jumlah EKUITAS	77.071,213
Jumlah KEWAJIBAN DAN EKUITAS	372.006,765

Pontianak, 30 Juni 2022
 SEKRETARIS

 SUAHADIANA
 Sekretaris

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 30 JUNI 2022

Kode Lap : NPSANG

Tanggal : 25-02-2022

(Halaman) : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LSD/DA : (079) AKADEMI PEMERINTAH UMUM
 ESelon : (01) KEMISI PEMERINTAH UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1300) KEM. PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : (00000) KPAJ. KOTA PONTIANAK
 JENIS KENDAHANGAN : (00) Rincian Daerah

TRF. ANGGARAN	KODE PROGRAM	NAMA PERKAWAL	DEBIT	KREDIT
	111011	Kas di Bendahara Pengeluaran	24.000.000	0
	110111	Peralatan dan Mesin	2.547.259.158	0
	113111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2.109.262.293
	160112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	605.000	0
	160122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	604.000
	212111	Saluran pegangan yang masih harus dibayar	0	253.251.234
	218111	Utang Yang Belum Dibayar Tagihannya	0	13.664.918
	219611	Utang Mula dari IPPN	0	34.000.000
	219711	Diaghtory ke Entitas Lain	0	1.440.937.241
	281111	Ekuitas	0	457.744.181
	511111	Saluran Gas Pabrik PMS	437.445.753	0
	511119	Beban Pembelian Gas PMS	6.083	0
	511121	Beban Tung. Sumbuh PMS	32.529.739	0
	511123	Beban Tung. Anak PMS	9.949.944	0
	511125	Beban Tung. Sektoral PMS	37.280.000	0
	511126	Beban Tung. 20% PMS	1.664.242	0
	511128	Beban Tung. Bersih PMS	26.318.040	0
	511129	Beban Utang Mula PMS	51.020.000	0
	511151	Beban Tunjangan Umum PMS	14.040.000	0
	511332	Beban Utang Kehonatan Pejabat Negara	607.156.600	0
	520111	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kejutan/Konsep)	397.948.220	0
	521111	Beban Negeri/Kel. Perawatan	24.761.475	0
	521114	Beban Pengerahan Surat Dinas Pns Pusat	26.000	0
	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	38.800.000	0
	521119	Beban Biaya Operasional Lainnya	26.025.000	0
	521121	Beban Biaya Operasional (Pengerahan Penderita COVID-19)	20.000.000	0
	521311	Beban Bahan	620.000	0
	521319	Beban Biaya Non Operasional Lainnya	8.174.500	0
	522111	Beban Langganan Listrik	30.446.266	0
	522112	Beban Langganan Telepon	790.000	0
	522113	Beban Langganan Air	1.081.000	0
	522121	Beban Sewa Lainnya	19.766.000	0
	523121	Beban Pembelian Peralatan dan Mesin	18.446.073	0
	524111	Beban Perjalanan Dinas Bilas	130.000	0
	524117	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000	0
	525111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	102.737.296	0
		JUMLAH	4.393.754.447	4.393.754.447

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM : 078
 ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
 SATUAN KERJA : KPU KOTA PONTIANAK : 665322

Revisi: 0
 Nama File: 665322
 Tanggal: 30/07/2022 13:50:08
 Halaman: 1
 Page ID: 665322_665322_665322-3417

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
T	Z	1	2	3	4	1	2	3	4
A	FONDIATAS NEGARA DIMAYORITASI				0				0
	PENERANGAN PERSALUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERANGAN NEGARA DENGAN PILAK	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERANGAN HSRI	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah FondiAtas Dim Mayoritas	0	0	0	0	0	0	0	0
E	BELANJA				0				0
	BELANJA PERSONALIA	2.340.041.000	1.279.655.415	1.265.375.555	54	2.342.459.000	1.275.131.260	1.067.327.740	54
	BELANJA BARANG	881.720.000	881.371.905	700.459.074	79	818.603.000	772.951.524	932.771.796	93
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEPADA UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSID	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HEMAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Belanja (B1 - B11)	3.221.761.000	1.840.927.345	1.965.834.629	57	3.161.062.000	1.948.082.784	1.264.799.536	61
C	FUNDIAYAN				0				0

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 079 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : 656532 KPU KOTA PONTIANAK
 JEMIS SATUAN KERJA : 40

Kode Lap : L0.5AT
 Tanggal : 24/07/22 7:01 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : Mpt. ke. satuan - SMT
 Tol. Data : 24/07/22 7:27 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
RESDAPAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemrintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN Hibah	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
REBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Belanja Pegawai	1.534.716.448	1.275.131.260	259.585.188	20,361
Belanja Perawatan	0	11.472.100	(11.472.100)	(100)
Belanja Barang dan Jasa	156.441.388	154.238.690	2.202.698	(1,5)
Belanja Perjalanan Dinas	116.365.028	23.183.112	93.181.916	20,360
Belanja Perjalanan Dinas	2.540.000	3.450.000	(910.000)	(26,47)
Belanja Barang Lain, Termasuk Kipras Monev/audit	0	0	0	
Belanja Sisa	0	0	0	
Belanja Subsidi	0	0	0	
Belanja Hibah	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078 : KOMISI PEMILIHAN UMUM
 E/ELON I : 01 : KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : 1000 : KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : 658932 : KPU / KOTA PONTIANAK
 JEMIS SATUAN KERJA : RD

Kode Lap : LO SAT
 Tanggal : 24/07/22 2:31 AM
 Halaman : 2
 Pg. 0 : lap_lo_satker - SATK
 Tj. Dulu : 24/07/22 2:27 AM

URAIAN	2022	2021	KERAIKAN PENURUNAN	(%)
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	
Belanja Penyelenggaraan Pemilihan Umum	109.737.398	148.780.203	(39.042.805)	26,734
Belanja Penyelenggaraan Pilang Tak Tertegah	0	0	0	
Belanja Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BESAR	1.021.810.208	1.848.962.727	774.647.880	43,004
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1.021.810.208)	(1.848.962.727)	(174.647.902)	10,004
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelenggaraan Ases Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Penyelenggaraan Ases Non Lancar	0	0	0	
Belanja Penyelenggaraan Ases Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelenggaraan Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelenggaraan Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Belanja Penyelenggaraan Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Belanja dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BANGSA	(1.021.810.208)	(1.848.962.727)	(174.647.902)	10,004
POS LUAR BANGSA	0	0	0	
Belanja Luar Bangsa	0	0	0	
POS LUAR BANGSA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1.021.810.208)	(1.848.962.727)	(174.647.902)	10,004

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEHENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 075 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 E SELON I : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : 1000 KALIMANTAN BARAT
 JENIS SATUAN KERJA : KD
 SATUAN KERJA : 553532 KPU KOTA PONTIANAK

Tgl Dibik : 24/07/22 2:27 AM
 Koneksi : LPR SATKER
 Tanggal : 24/07/22 11 AM
 Page D : 00 04 0000 - 04/01

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	257.741.561	376.171.910	(218.430.745)	
SURPLUS/DEFISIT LG	(1.521.410.209)	(1.846.802.727)	(171.547.302)	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENURUNKAN EKUITAS	0	10.867.797	(10.867.797)	
PENYEDURAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(14.192.203)	14.192.203	
BELI/BIJI REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	25.000.000	(25.000.000)	
LAIN-LAIN	0	0	0	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1.490.937.247	1.297.102.464	(203.245.122)	
KEMAHAN/PENURUHAN EKUITAS	(380.672.541)	(131.673.600)	(241.705.652)	
EKUITAS AWAL	17.071.210	337.292.644	(700.121.291)	

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 07E

KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : 01

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOUAPPLW

079011300KD

BA(07E) E31(01) KALIMANTAN BARAT

KODE SATKER

656532

KPU/KOTA PONTIANAK

Tgl. Dib. : 24/07/2022 2:25 AM

Tgl. Cetak: 24/07/2022 7:52 AM

42_neraca_saker_komparatif-rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kesalahan (Perubahan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setoraneq Transien	24.000.000	0	24.000.000	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	24.000.000	0	24.000.000	
ASET TETAP				
Persediaan dan Meq	2.547.259.156	2.547.259.156	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2.199.252.261)	(2.089.514.961)	(109.737.300)	5,25
JUMLAH ASET TETAP	548.006.895	457.744.195	(188.737.396)	(34,87)
ASET LAINNYA				
Piut Lainya	925.000	925.000	0	0,00
AKUMULASI PERPENYUSUTAN/DEKRESIFIKASI ASET LAINNYA	(925.000)	(925.000)	0	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	372.006.895	457.744.191	(85.737.396)	(18,73)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ekstern	254.041.534	0	254.041.534	0,00
Utang Yang Belum Dibayarkan	16.864.518	0	16.864.518	0,00
Utang Muka dari KPPN	34.000.000	0	34.000.000	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	294.906.052	0	294.906.052	
JUMLAH KEWAJIBAN	294.906.052	0	294.906.052	
EKUITAS				
EKUITAS				
Defisit	77.071.213	457.744.191	(380.672.948)	(83,16)
JUMLAH EKUITAS	77.071.213	457.744.191	(380.672.948)	(83,16)
JUMLAH EKUITAS	77.071.213	457.744.191	(380.672.948)	(83,16)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	372.006.895	457.744.191	(85.737.396)	(18,73)

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA : 079
 UNIT ORGANISASI : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 1360
 SATUAN KERJA : 650532

KOMISI PEMULIHAN UMUM
 KOMISI PEMULIHAN UMUM
 KALIMANTAN BARAT
 KPU / KOTA PONTIANAK

Tgl. Data : 24/07/2022 2:20:AM

Tgl. Cetak : 24/07/2022 7:52 AM

lap_neraca_percobaan_biruk_server-SAKTI

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111011	Paid di Bertambah Penghasilan	34.000.000	0
0.0	111104	Pembelian Lainnya	0	0
0.0	122113	Saldo dan Meas	2.547.355.150	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan (Pembelian dan Meas)	0	2.116.252.300
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
0.0	160112	Akt Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	620.000	0
0.0	160122	Akumulasi Penyusutan Akt Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	620.000
0.0	212111	Sisa Realisasi yang Masih Harus Dibayar	0	250.051.254
0.0	218113	Utang Yang Harus Dibayar Tagihannya	0	1.084.978
0.0	218511	Utang Mula dan PPN	0	34.000.000
0.0	310111	Dipaparkan ke Entitas Lain	0	1.440.937.341
0.0	391113	Duitan	0	457.744.161
3.0	511111	Sisaan Gaji Pokok PNS	455.430.700	0
3.0	511115	Sisaan Pembinaan Gaji PNS	5.083	0
3.0	511121	Sisaan Tunj. Sumbangan PNS	30.520.720	0
3.0	511122	Sisaan Tunj. Anak PNS	6.589.944	0
3.0	511123	Sisaan Tunj. Sukuad PNS	31.280.000	0
3.0	511125	Sisaan Tunj. PPK PNS	1.654.340	0
3.0	511126	Sisaan Tunj. Biaya PNS	26.718.040	0
3.0	511129	Sisaan Uang Makan PNS	51.680.000	0
3.0	511131	Sisaan Tunjangan Umum PNS	14.880.000	0
3.0	511132	Sisaan Uang Kembalikan Pijaud Negara	607.166.600	0
3.0	515111	Sisaan Pegawai (Tunjangan Khusus) Reguler	987.546.225	0
3.0	521111	Sisaan (perbaikan) Perbaikan	24.001.470	0
3.0	521114	Sisaan Penggantian Ganti Ombak Pda Pda	25.000	0
3.0	521115	Sisaan Biaya Operasional Satuan Kerja	30.800.000	0
3.0	521116	Sisaan Biaya Operasional Lainnya	30.185.000	0
3.0	521131	Sisaan Biaya Operasional - Penggantian Fasilitas COVID-19	20.000.000	0
3.0	521211	Sisaan Bahan	620.000	0
3.0	521215	Sisaan Biaya Non Operasional Lainnya	6.174.500	0
3.0	522111	Sisaan Langganan Listrik	20.415.000	0
3.0	522112	Sisaan Langganan Telepon	100.000	0
3.0	522113	Sisaan Langganan Air	1.400.000	0
3.0	522191	Sisaan Jasa Lainnya	12.135.500	0
3.0	523121	Sisaan Pemeliharaan Perbaikan dan Meas	18.400.000	0
3.0	524111	Sisaan Penyediaan Baku	100.000	0
3.0	524112	Sisaan Penyediaan Obat dan Bahan Akti	2.100.000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA : 079
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1360
SATUAN KERJA : 650532

KOMISI PEMULIHAN UMUM
KOMISI PEMULIHAN UMUM
KALIMANTAN BARAT
KPU / KOTA PONTIANAK

Tgl. Data : 24/07/22 2:20 AM

Tgl. Cetak : 24/07/2022 7:52 AM

lap_neraca_percobaan_bkpl_server-SAKTI

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Sisa/ Penyesuaian Pembelian dan Modal	100.757,300	0
Jumlah			4.393.764,447	4.393.764,447